

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 27

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 70);
 3. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Nomor 050/004/Bappeda/2021 tanggal 23 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Sat. Pol. PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Sat. Pol. PP dan Damkar Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Sat. Pol. PP dan Damkar yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penetapan Renstra sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan Renja; dan
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD.

(2) Tujuan Renstra untuk:

- a. penetapan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Sat. Pol. PP dan Damkar, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. penetapan pedoman dalam penyusunan Renja dan perencanaan penganggaran.

BAB III ...

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Renstra merupakan:

- a. penjabaran strategi pembangunan Daerah dan program prioritas Wali Kota dan wakil Wali Kota, sesuai dengan tugas dan fungsi Sat. Pol. PP dan Damkar; dan
- b. dokumen perencanaan Sat. Pol. PP dan Damkar yang memberikan arah sekaligus acuan bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sat. Pol. PP dan Damkar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sat. Pol. PP dan Damkar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sat. Pol. PP dan Damkar periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sat. Pol. PP dan Damkar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Sat. Pol. PP dan Damkar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Sat. Pol. PP dan Damkar yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV ...

- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sat. Pol. PP dan Damkar.
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sat. Pol. PP dan Damkar lima tahun mendatang.
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Sat. Pol. PP dan Damkar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sat. Pol. PP dan Damkar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
 - h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Sat. Pol. PP dan Damkar melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan Renstra; dan
 - b. pelaksanaan Renstra.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil Renstra.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil dari pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:
- a. terdapat penambahan dan/atau pengurangan program; dan
 - b. penambahan kegiatan baru.
- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD;
- (3) Perubahan Renstra berpedoman kepada perubahan RPJMD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 41).

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



Hj. LULU YULIASARI, S.H.

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

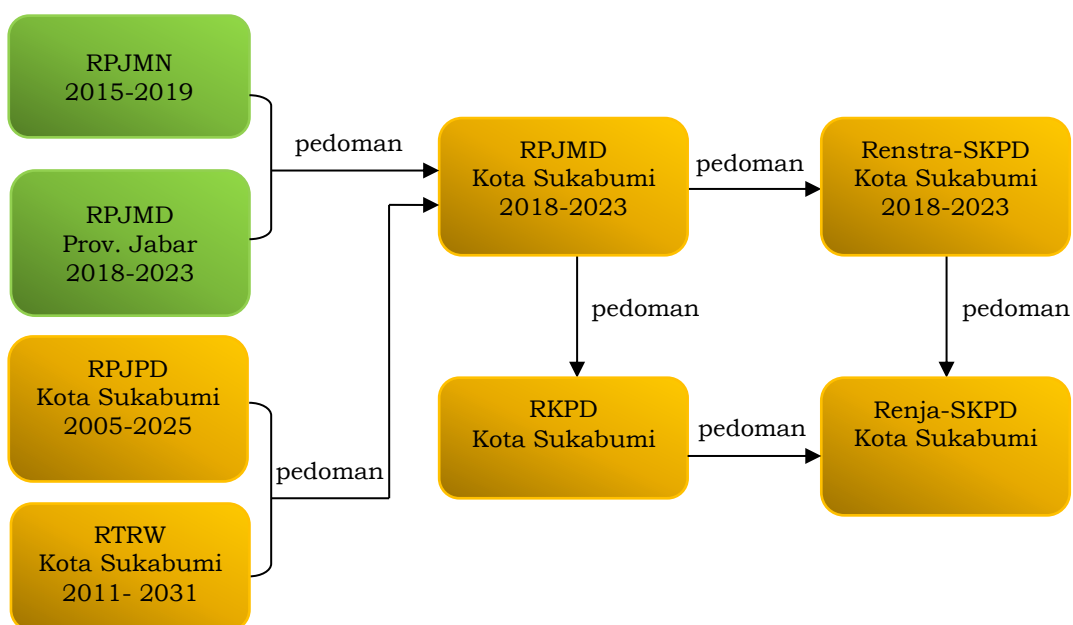
1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap mengacu kepada bentuk dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melaksanakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut meletakkan otonomi seluas-luasnya pada pemerintahan daerah kota dan kabupaten. Selanjutnya sebagaimana dijabarkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa tiap-tiap daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid -19)* yang melanda hampir di semua negara tidak terkecuali Indonesia mengakibatkan terjadinya refofusing anggaran untuk penanggulangan pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid -19)*, maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun Restra Dinas yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra ini pada hakikatnya merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Dinas dengan Pemerintah Daerah. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas adalah penegakan peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi daerah dan pemerintahan yang tentram, tertib, dan teratur. Adapun penetapan visi, misi, tujuan, strategis, dan kebijakan yang ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, tidak terlepas dan merupakan cerminan realisasi visi, misi, tujuan, strategi serta arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Keterkaitan antara Renstra Dinas dengan dokumen perencanaan lainnya, akan lebih jelas terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 70).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusun Renstra Dinas adalah :

Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas adalah :

1. menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
2. menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
3. menjadi acuan resmi untuk penilaian Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra secara garis besar disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sat. Pol. PP dan Damkar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sat. Pol. PP dan Damkar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sat. Pol. PP dan Damkar periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sat. Pol. PP dan Damkar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Sat. Pol. PP dan Damkar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Satpol PP yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sat. Pol. PP dan Damkar.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sat.Pol. PP dan Damkar lima tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Sat. Pol. PP dan Damkar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sat. Pol. PP dan Damkar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

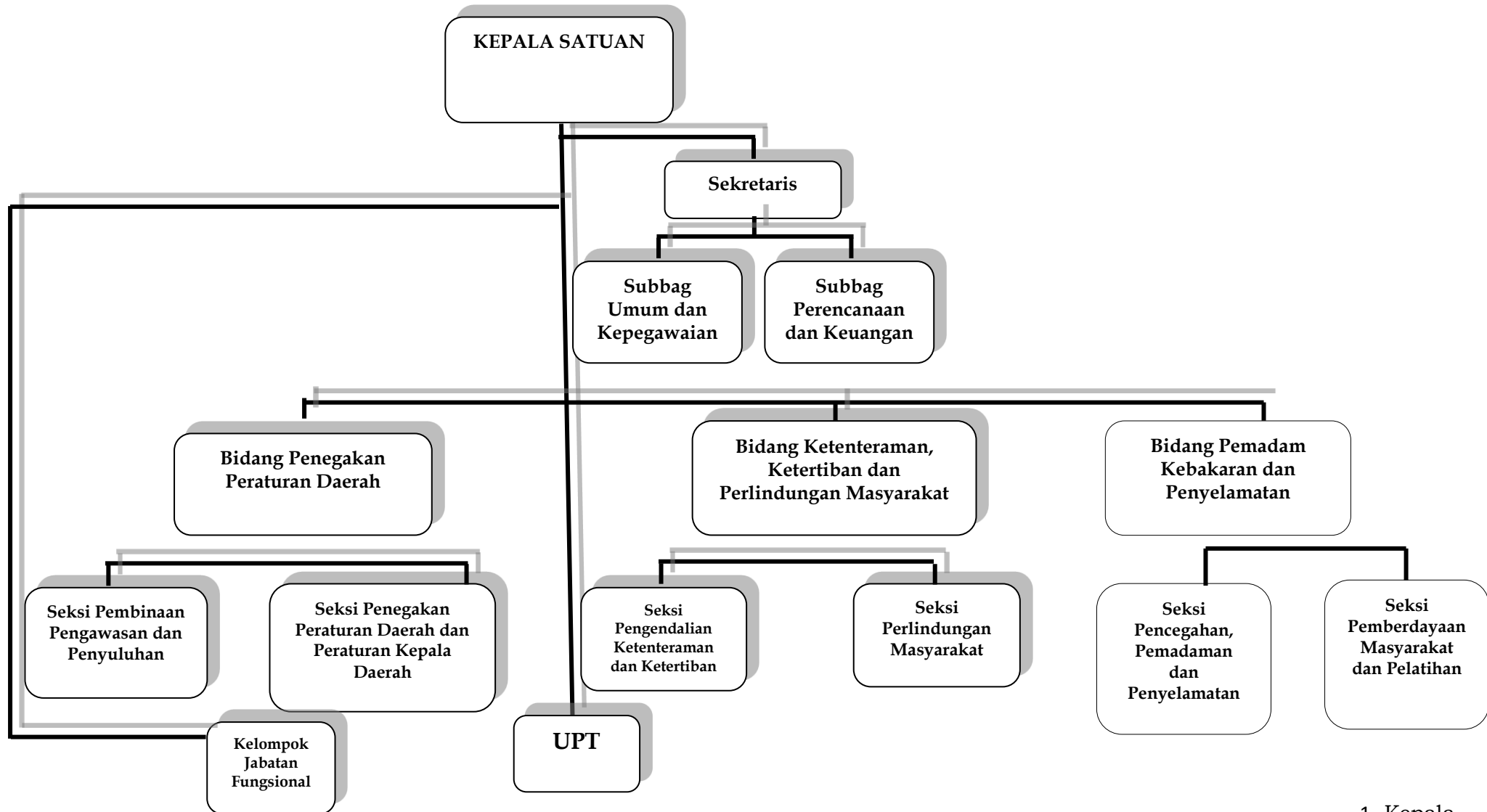
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya di singkat Sat. Pol. PP dan Damkar di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, selanjutnya tugas pokok dan fungsinya di atur dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sat. Pol. PP dan Damkar mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sat. Pol. PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
4. pelaksanaan administrasi Sat. Pol. PP dan Damkar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan pembagian tugas serta fungsinya, maka ditetapkan struktur organisasi yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Gambar ...

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



1. Kepala Sat. Pol. PP dan Damkar

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Sat. Pol. PP dan Damkar dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar berdasarkan rencana strategis Sat. Pol. PP dan Damkar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkaji dan melakukan koreksi terhadap izin, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ;
- d. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
- e. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- g. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- h. mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. melaksanakan pembinaan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- k. mempertanggungjawabkan tugas Sat. Pol. PP dan Damkar secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Sat. Pol. PP dan Damkar secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Sat. Pol. PP dan Damkar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memberi pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- c. melaksanakan penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Sat. Pol. PP dan Damkar;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Sat. Pol. PP dan Damkar secara terpadu;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;

f. menyusun ...

- f. menyusun anggaran dan penatausahaan keuangan Sat. Pol. PP dan Damkar;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern Sat. Pol. PP dan Damkar;
- h. mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- i. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Sat. Pol. PP dan Damkar;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- k. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Sat. Pol. PP dan Damkar;
- l. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan publik Sat. Pol. PP dan Damkar;
- m. mengoordinasikan dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerahs, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penegakan peraturan Daerah berdasarkan program kerja Sat. Pol. PP dan Damkar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan Daerah;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang penegakan peraturan daerah, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
- d. melaksanakan proses administrasi terhadap penegakan peraturan Daerah, peraturan Wali Kota, dan keputusan Wali Kota dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan Daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota;
- f. melaksanakan fasilitasi, pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil, pemberdayaan dan penyediaan pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan peraturan Walikota serta pelaksanaan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan;
- g. melaksanakan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran terhadap tempat atau lokasi terjadinya pelanggaran peraturan Daerah, peraturan Wali Kota, dan keputusan Wali Kota;
- h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang penegakan peraturan Daerah; dan

j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat berdasarkan program kerja Sat. Pol. PP dan Damkar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- c. menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis dan fasilitasi ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- d. menyusun bahan pengkajian koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta kerjasama operasional;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan kerjasama dengan aparaturnya pemerintah dalam rangka pengamanan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- f. menyusun jadwal pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan Daerah dan pejabat lainnya;
- g. melaksanakan pengamanan aset dan/atau barang milik Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan keramaian;
- i. melaksanakan pembinaan kewilayahan dan penyiapan bahan pelatihan dasar bagi anggota perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan pengamanan kegiatan pemilu di tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja di Daerah;
- l. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- a. menyusun rencana operasional pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan program kerja Sat. Pol. PP dan Damkar serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. melaksanakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanggulangan bahan berbahaya dan racun kebakaran;
- d. melaksanakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- f. melaksanakan standar pelayanan minimal pemadam kebakaran;

g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- i. melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- j. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam hal pencegahan serta penanggulangan kebakaran;
- k. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. melaksanakan pendataan dan verifikasi faktual yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- n. melaksanakan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai keseluruhan di Sat. Pol. PP dan Damkar adalah 156 orang, diantaranya 55 (lima puluh lima orang) orang PNS dan 101 (Seratus satu) orang non PNS:

1. Kualifikasi Pendidikan PNS Sat. Pol. PP dan Damkar

Tabel 2.1
Kualifikasi Pendidikan PNS Sat. Pol. PP dan Damkar

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	S2	3	
2.	S1	26	
3.	D4	1	
4.	SLTA	22	
5.	SLTP	2	
6.	SD	1	

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan sebanyak 55 (lima puluh lima) orang terdiri dari S2 3 (tiga) orang, S1 26 (dua puluh enam) orang, SLTA 22 (dua puluh dua) orang, SLTP 2 (dua) orang dan SD 1 (satu) orang.

2. Kualifikasi ...

2. Kualifikasi pendidikan Non PNS Sat. Pol. PP dan Damkar

Tabel 2.2
Kualifikasi Pendidikan Non-PNS Sat. Pol. PP dan Damkar

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	S1	24	
2.	D3	3	
3.	SLTA	73	
4.	SLTP	1	

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah pegawai Non PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan sebanyak 101 (seratus satu) orang terdiri dari S1 24 (dua puluh empat) orang, D3 3 (tiga) orang, SLTA 73 (tujuh puluh tiga) orang dan SLTP 1 (satu) orang.

3. Pangkat dan golongan

Tabel 2.3
Kualifikasi Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Ket.
1.	Pembina Tk. I, IV/b	1	
2.	Pembina, IV/a	2	
3.	Penata Tk.I, III/d	6	
4.	Penata, III/c	6	
5.	Penata Muda Tk.I, III/b	10	
6.	Penata Muda, III/a	6	
7.	Pengatur Tk.I, II/d	10	
8.	Pengatur, II/c	5	
9.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	8	
10.	Pengatur Muda, II/a	1	
13.	Non PNS	101	

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tahun 2020

C. Aset

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki aset yang didanai oleh APBD diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.4 ...

Tabel 2.4 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tanggal Registrasi	Sat.	Kondisi	Jmlh	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah						846.800.000
1.1	Tanah Bangunan Kantor						846.800.000
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Lettu Bakri Nomor 19 Sukabumi	31/12/1990	Bidang	Baik	1	846.800.000
2.	Peralatan Dan Mesin						4.133.000.818
2.1	Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor						3.605.894.441
	Sedan	Toyota/New Vios	31/12/2006	Unit	Baik	1	186.500.000
	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota/Avanza	31/12/2007	Unit	Baik	1	110.150.000
	Truck + Attachhment	Mitsubishi/FE304	31/12/2002	Unit	Baik	1	193.850.000
	Truck + Attachhment	IZUSU	31/12/2015	Unit	Baik	1	363.431.399
	Truck + Attachhment	IZUSU	31/12/2015	Unit	Baik	1	394.937.663
	Pick Up	Toyota/Kijang KF60	31/12/2003	Unit	Baik	1	99.000.000
	Pick Up	Mitsubishi/L300	31/12/2006	Unit	Baik	1	133.000.000
	Pick Up	Toyota/Hylux	31/12/2014	Unit	Baik	1	205.410.260
	Pick Up	Isuzu D-Max V-GS	31/12/2015	Unit	Baik	1	343.100.000
	Pick Up	Isuzu D-Max V-GS	31/12/2015	Unit	Baik	1	436.572.988
	Pick Up	Isuzu D-Max V-GS	31/12/2015	Unit	Baik	1	436.572.988
	Kendaraan Bermotor Khusus Lain- lain	Mobil Pelayanan Proses Tipiring	31/12/2016	Unit	Baik	1	476.293.158
	Sepeda Motor	Honda/Tiger GL 200	31/12/2003	Unit	Baik	1	20.000.000
	Sepeda Motor	Suzuki/Smash	31/12/2006	Unit	Baik	1	12.000.000
	Sepeda Motor	Honda/ Surpra X 125	31/12/2013	Unit	Baik	1	15.361.731
	Sepeda Motor	Honda/ Surpra X 125	31/12/2013	Unit	Baik	1	15.361.731
	Sepeda Motor	Kawasaki/LX150E CKD	31/12/2015	Unit	Baik	1	27.500.000
	Sepeda Motor	Kawasaki/LX150E CKD	31/12/2015	Unit	Baik	1	27.500.000
	Sepeda Motor	Kawasaki/LX150E CKD	31/12/2015	Unit	Baik	1	27.500.000
	Sepeda Motor	Kawasaki/LX150E CKD	31/12/2015	Unit	Baik	1	27.500.000
	Sepeda Motor	Kawasaki/LX150E CKD	31/12/2015	Unit	Baik	1	27.500.000
	Sepeda Motor	Kawasaki/LX150E	31/12/2015	Unit	Baik	1	26.852.522

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tanggal Registrasi	Sat.	Kondisi	Jmlh	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
		CKD					
2.2	Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga						164.979.421
	Filling Besi/Metal	Pioneer	31/12/2007	Unit	Baik	1	750.000
	Filling Besi/Metal		31/12/2015	Unit	Baik	1	2.344.734
	Filling Besi/Metal		31/12/2015	Unit	Baik	1	2.344.734
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor non Besi/Metal lain-lain		31/12/2009	Unit	Baik	1	1.950.000
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor non Besi/Metal lain-lain		31/12/2009	Unit	Baik	1	1.950.000
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor non Besi/Metal lain-lain		31/12/2009	Unit	Baik	1	1.950.000
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor non Besi/Metal lain-lain		31/12/2009	Unit	Baik	1	1.950.000
	Lemari Kayu		31/12/2009	Unit	Baik	1	975.000
	Lemari Kayu		31/12/2009	Unit	Baik	1	975.000
	Lemari Kayu		31/12/2009	Unit	Baik	1	975.000
	Lemari Kayu		31/12/2009	Unit	Baik	1	975.000
	Lemari Besi		31/12/2015	Unit	Baik	1	2.344.734
	Lemari Besi		31/12/2015	Unit	Baik	1	2.344.734
	Sofa Rangka Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	3.195.000
	Meja Rapat Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.695.000
	Meja Rapat Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.695.000
	Meja Rapat Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.695.000
	Meja Rapat Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.695.000
	Meja Rapat Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.695.000

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tanggal Registrasi	Sat.	Kondisi	Jmlh	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meja Rapat Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.695.000
	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal		31/12/2009	Unit	Baik	1	1.421.250
	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal		31/12/2009	Unit	Baik	1	1.421.250
	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal		31/12/2009	Unit	Baik	1	1.421.250
	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal		31/12/2009	Unit	Baik	1	1.421.250
	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.480.000
	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.480.000
	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.480.000
	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.480.000
	Meja 1/2 Biro Non Besi/Metal		31/12/2010	Unit	Baik	1	1.480.000
	Tangga Alumunium	Krisbow	31/12/2014	Unit	Baik	1	2.242.130
	AC Unit		31/12/2015	Unit	Baik	2	4.596.000
	Lemari Es	GEA	31/12/2016	Unit	Baik	1	1.665.931
	AC Split	LG	31/12/2016	Unit	Baik	1	4.442.482
	Televisi	Samsung Smart TV LED	31/12/2016	Unit	Baik	1	5.433.961
	Lemari Besi	Blue Krisbow	31/12/2016	Unit	Baik	2	4.798.420
	Lemari Besi	MM Krisbow	31/12/2016	Unit	Baik	2	5.398.680
	Alat Penghancur Kertas	Solution	31/12/2016	Unit	Baik	1	1.550.000
	Meja Kayu/Rotan	Donaty DOD.10	31/12/2016	Unit	Baik	8	10.224.000
	Meja Kayu/Rotan	Donaty DOD.11	31/12/2016	Unit	Baik	2	2.176.000
	Kursi Putar Besi/Metal	Donaty O-126	31/12/2016	Unit	Baik	2	2.420.000
	Kursi Putar Besi/Metal	Donaty LC-4L	31/12/2016	Unit	Baik	4	4.440.000
	Bangku Tunggu Besi/Metal	Donaty LC-4B	31/12/2016	Unit	Baik	1	2.150.000
	Alat Penghancur Kertas		31/12/2015	Unit	Baik	2	3.040.000
	Dispenser		31/12/2015	Unit	Baik	1	2.420.000
	Lemari Besi	Krisbow	20/07/2017	Unit	Baik	4	10.797.380
	Lemari Besi	Krisbow	20/07/2017	Unit	Baik	3	7.197.630

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tanggal Registrasi	Sat.	Kondisi	Jmlh	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lemari Besi	Krisbow	20/07/2017	Unit	Baik	3	7.197.630
	AC Split	Midea MSB2-09CP	21/07/2017	Unit	Baik	2	7.256.864
	Locker Besi/Metal	Krisbow	22/06/2018	Unit	Baik	4	13.594.900
	Lemari Besi	Krisbow	22/06/2018	Unit	Baik	1	2.399.210
	Lemari Besi	Krisbow	22/06/2018	Unit	Baik	2	4.798.420
	Filling Besi/Metal	Krisbow	22/06/2018	Unit	Baik	2	4.862.000
	Locker Besi/Metal	Krisbow	22/06/2018	Unit	Baik	1	1.598.850
	Alat Bengkel						14.530.343
	Mesin Gergaji	Krisbow/Gasoline Chain Saw 181N	31/12/2014	Unit	Baik	1	1.882.000
	Mesin Gergaji	Krisbow/Gasoline Chain Saw 181N	31/12/2014	Unit	Baik	1	1.882.000
	Genset	Tiger 8800	31/12/2016	Unit	Baik	1	7.774.343
	Steam Cleaner	Risbow	20/07/2017	Unit	Baik	1	2.992.000
2.4	Alat Studio Dan Komunikasi						88.029.142
	Kamera Digital	Sony DCR SR68E	31/12/2011	Unit	Baik	1	4.300.000
	Kamera Digital	Sony/ILCE 3500	31/12/2014	Unit	Baik	1	5.600.000
	Kamera Digital	Sony/ILCE 3501	31/12/2014	Unit	Baik	1	5.600.000
	Kamera Digital		31/12/2015	Unit	Baik	1	6.375.000
	Kamera Digital	Sony DSC-WX80	31/12/2015	Unit	Baik	1	2.700.000
	Handycam	Sony PJ5PRSM	31/12/2015	Unit	Baik	1	5.407.750
	Handy Talky	Molson M.1	31/12/2012	Unit	Baik	1	987.500
	Handy Talky	Molson M.1	31/12/2012	Unit	Baik	1	987.500
	Handy Talky	Molson M.1	31/12/2012	Unit	Baik	1	987.500
	Handy Talky	HLT-VHF	31/12/2013	Unit	Baik	1	938.863
	Wireless Amplifier	Pioneer	31/12/2016	Unit	Baik	1	2.776.551
	Closed Circuit Television (CCTV)	Sucher	31/12/2016	Unit	Baik	1	6.663.723
	Tripod Sound	Somita	31/12/2016	Unit	Baik	1	1.110.620
	Unit Transceiver SSB Transportable	Alinco	31/12/2016	Unit	Baik	1	4.442.482
	Kamera Digital	Canon EOS 750D Kit 2	31/12/2016	Unit	Baik	1	13.510.115
	Digital Video Recorder (DVR)	AHD JMK	31/12/2016	Unit	Baik	1	2.059.615
	Alat Penyimpan Data	WD Purple	31/12/2016	Unit	Baik	1	1.601.923
	LCD Proyektor	LGFW800G-GL	31/12/2016	Unit	Baik	1	7.300.000
	Unit Transceiver SSB	Icom	31/12/2007	Unit	Baik	1	2.000.000

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tanggal Registrasi	Sat.	Kondisi	Jmlh	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
	Transportable						
	LCD Proyektor	Philips ppx 4530	03/12/2017	Unit	Baik	1	4.900.000
	Layar Proyektor	70"x70"	13/12/2017	Unit	Baik	1	1.950.000
	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	Icom 2300	22/06/2018	Unit	Baik	2	5.830.000
2.5	Komputer						148.246.493
	P.C Unit		31/12/2015	Unit	Baik	1	8.899.000
	P.C Unit	Lenovo C26057328508	31/12/2015	Unit	Baik	1	6.750.000
	P.C Unit	Lenovo C26057328508	31/12/2015	Unit	Baik	1	6.750.000
	P.C Unit	Lenovo C26057328508	31/12/2015	Unit	Baik	1	6.750.000
	P.C Unit	Lenovo C40-30FOB400 4 WD	31/12/2015	Unit	Baik	1	8.650.000
	Note Book	HP Business Pro Book 440 G3 (66 PT)	31/12/2016	Unit	Baik	2	16.741.341
	Printer	Epson L455	31/12/2016	Unit	Baik	2	8.035.844
	Desktop PC	Lenovo IDEACENTRE AIO 510-22ISH F0CB00FID	31/12/2016	Unit	Baik	1	8.999.000
	Desktop PC	Lenovo IDEACENTRE AIO300-20ISH F0BVOO12ID	31/12/2016	Unit	Baik	1	8.899.000
	Printer	BROTHER DCP - T300	31/12/2016	Unit	Baik	2	5.560.000
	Note Book	Toshiba L630	31/12/2011	Unit	Baik	1	8.025.318
	Tablet PC	Hp	31/12/2015	Unit	Baik	1	4.900.000
	Tablet PC	Hp	31/12/2015	Unit	Baik	1	4.900.000
	Printer		31/12/2015	Unit	Baik	1	1.935.000
	Printer	Brother DCP-J100 Ink Benefit	31/12/2015	Unit	Baik	1	2.000.000
	Printer	Brother DCP-J100 Ink Benefit	31/12/2015	Unit	Baik	1	2.000.000
	P.C Unit	Lenovo All In One Bussines	11/10/2017	Unit	Baik	2	9.523.000
	P.C Unit	Lenovo All In One Idea Centre AIO 310-20IAP	11/07/2017	Unit	Baik	3	16.178.490
	Note Book	Acer Aspire Switch 10e	11/07/2017	Unit	Baik	1	5.596.500
	Printer	Epson L565	12/10/2017	Unit	Baik	1	4.169.000
	Printer	Epson L385	12/10/2017	Unit	Baik	1	2.985.000
2.6	Alat Keamanan Lainnya/Alat Pemadam						90.320.979
	Pistol Gas	KJW1911	31/12/2015	Unit	Baik	1	3.750.000
	Pistol Gas	WG731RFV	31/12/2015	Unit	Baik	1	3.750.000
	Pistol Gas	WG733RFV	31/12/2015	Unit	Baik	1	3.750.000
	Pistol Gas	WG733RFV	31/12/2015	Unit	Baik	1	3.750.000

No. Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tanggal Registrasi	Sat.	Kondisi	Jmlh	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
	Alat Pemadam Portable	Hossoni	31/12/2016	Unit	Baik	1	6.663.723
	Alat Keamanan Lain-lain		31/12/2015	Unit	Baik	30	68.657.256
2.7	Papan Visual						21.000.000
	Papan Visuil Besi/Metal		06/06/2018	Unit	Baik	14	21.000.000

Sumber : Data Aset Dinas Tahun 2020

D. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas dalam melakukan pelayanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi. Dalam menegakkan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Dinas berpedoman pada perundang-undangan serta peraturan daerah Kota Sukabumi serta pedoman tertulis yang mengatur tentang satuan polisi pamong praja di tingkat Provinsi maupun Pusat.

Pada tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi. Sehingga pada tahun 2020 terdapat revisi terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan menetapkan sasaran Renstra sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kamtramtibmas;
2. Meningkatnya pengendalian bahaya kebakaran;
3. meningkatnya pengurangan resiko bahaya kebakaran;

Gambaran pelayanan Dinas baik secara kinerja maupun anggaran periode sebelumnya ditampilkan pada Tabel 2.5 dan 2.6 berikut :

Tabel 2.5 ...

Tabel 2.5.A (T-C.23) Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	Persentase unjuk rasa yang terkendali				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Persentase penyelesaian pelanggaran perda				-	55%	67,5 %	80%	92,5 %	-	75,5 %	96,5 %	81%	89,6 %	-	1,37	1,43	1,01	0,97
4.	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan				100%	100%	100%	100%	100%	-	-	21 kegiatan	25 kegiatan	27 kegiatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

sumber : data capaian kinerja 2014-2018 Dinas

Dari tabel diatas selama 5 tahun periode Renstra 2013-2018 terdapat 4 indikator pada Dinas, yang sepenuhnya hampir tercapai. Namun ada 1 indikator hingga akhir periode Renstra tidak tercapai yaitu pada indikator persentase penyelesaian pelanggaran perda yang hanya tercapai 97% pada akhir periode 2018.

Tabel 2.5.B (T-C.23) Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -		Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)				420 Orang	840 Orang	490 Orang	-	116%	-
3.	Persentase Penegakan Perda				80%	85%	100%	100%	125%	117%
4.	Cakupan Pengendalian Keamanan Lingkungan				100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Unjuk Rasa Terkendali				100%	100%	100%	100%	100%	100%

sumber : data capaian kinerja 2019-2020

Dari tabel diatas selama 2 tahun periode Renstra 2019-2020 terdapat 5 indikator pada Dinas, yang sepenuhnya hampir tercapai. Namun ada 1 indikator pada tahun 2020 tidak mencapai target di karenakan anggaran kegiatan di refocusing untuk penanganan pandemi covid-19. Adapun 1 indikator melebihi target yang telah di tetapkan hingga tahun 2020 mencapai 117%.

Tabel 2.6 ...

Tabel 2.6. A (TC.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014	2015	2016	2017	2018	Agr.	Rls.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.206.555,5	1.386.932,1	2.306.864,5	2.387.461,3	2.509.775	1.175.245,8	1.164.386,2	2.010.009,2	2.237.474	2.211.004,8	0,97	0,84	0,87	0,94	0,88	0,20	0,17
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,05
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	13.798	18.600	41.320	45.222	48.822	12.633,3	16.954,8	35.442	41.101	44.821,2	0,92	0,91	0,86	0,91	0,92	0,37	0,37
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000					5.000					1,00						
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.108.715	1.173.870	2.060.165	2.074.598,6	2.128.435	1.084.175	996.350	1.784.510	1.935.395,6	1.846.800	0,98	0,85	0,87	0,93	0,87	0,18	0,14
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.252	6.464	9.630,5	11.989	27.552,5	5.252	6.464	8.236,9	11.903,3	26.913,9	1,00	1,00	0,86	0,99	0,98	0,51	0,50
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.200	10.900	9.450	3.890	2.925	5.200	10.899,9	2.936	3.883,5	2.885	1,00	1,00	0,31	1,00	0,99	-0,13	-0,14
Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.086,5	28.236	83.080	78.828,2	75.505,3	8.086,5	28.006	81.500	76.264,6	69.923	1,00	0,99	0,98	0,97	0,93	0,75	0,71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000	9.425	20.500	15.468	20.033,2	4.000	9.425	20.498,4	15.424,9	14.705	1,00	1,00	1,00	1,00	0,73	0,50	0,38
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.304	2.277	2.764	4.971,5	4.468	2.304	2.277	1.083	3.382	4.408,8	1,00	1,00	0,39	0,68	0,99	0,18	0,18
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000	6.405	5.520	6.960	8.400	4.770	6.405	5.500	6.815	7.155	0,95	1,00	1,00	0,98	0,85	0,14	0,11
Penyediaan Makanan dan	12.750	16.440	16.544	15.234	21.784	12.750	12.584,5	12.683,7	13.056,5	21.584	1,00	0,77	0,77	0,86	0,99	0,14	0,14

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014	2015	2016	2017	2018	Agr.	Rls.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Minuman																	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	35.450	57.400	56.700	129.100	170.650	30.075	40.155	56.419	129.047,8	170.608,6	0,85	0,70	1,00	1,00	1,00	0,48	0,54
Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja		55.715					33.665					0,60					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	199.919	398.016,5	397.033,6	475.361,6	880.186	196.931,3	379.741,8	388.015,6	452.654,3	600.055,6	0,99	0,95	0,98	0,95	0,68	0,45	0,32
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional					260.000					259.930					1,00		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		64.700	35.147,1	76.550	139.295		62.893,9	35.005,1	70.901,5	136.883,3		0,97	1,00	0,93	0,49	0,09	0,06
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5.620,9	1.600	6.000	22.000		5.460	1.550	2.992	21.713,2		0,97	0,97	0,50	0,99	0,03	-0,26
Pengadaan Mebeuleir			31.466		40.000			31.466		37.910			1,00		0,95		
Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi		8.000	20.750	7.500	18.590		7.625	19.890	7.325	17.759,5		0,95	0,96	0,98	0,96	-0,03	0,33
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	9.000	97.065,6	25.180,5	25.763,1	34.141	9.000	96.176	18.185	21.635,1	29.541,5	1,00	0,99	0,72	0,84	0,87	0,40	0,35
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	190.919	222.630	282.890	359.548,5	366.160	187.931,3	207.586,9	281.919,5	349.800,7	356.248,1	0,98	0,93	1,00	0,97	0,97	0,18	0,17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	170.500	232.892	306.471,5	144.355	247.325	167.570	231.347,5	303.963,5	138.565	235.243,5	0,98	0,99	0,99	0,96	0,95	0,10	0,09

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014	2015	2016	2017	2018	Agr.	Rls.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	170.500	232.892	306.471,5	144.355	247.325	167.570	231.347,5	303.963,5	138.565	235.243,5	0,98	0,99	0,99	0,96	0,95	0,10	0,09
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.360					13.410					0,87			
Optimalisasi Kemampuan Aparatur				15.360					13.410					0,87			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.500	13.350	20.360	24.242,5	24.480	9.499	13.350	20.360	24.242,5	23.411,5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,27	0,25
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000	5.750	8.084	10.675	10.800	4.999	5.750	8.084	10.675	10.368	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,21	0,20
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.500	2.300	4.092	4.522,5	4.560	1.500	2.300	4.092	4.522,5	4.320	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,32	0,30
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.500	2.300	4.092	4.522,5	4.560	1.500	2.300	4.092	4.522,5	4.320	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,32	0,30
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.500	3.000	4.092	4.522,5	4.560	1.500	3.000	4.092	4.522,5	4.403,5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,32	0,31
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD					20.000					19.130					0,96		
Program Perencanaan dan		6.950	16.182	15.416	36.830		6.950	16.182	15.416	35.137,8		1,00	1,00	1,00	0,95	1,30	0,72

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014	2015	2016	2017	2018	Agr.	Rls.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penganggaran																	
Penyusunan Rencana Kerja SKPD		6.950	16.182	15.416	15.860		6.950	16.182	15.416	14.572,8		1,00	1,00	1,00	0,92	0,49	0,22
Penyusunan Rencana Strategis SKPD					20.970					20.565					0,98		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	304.177	413.537,5	437.749	641.203.500	426.375	281.638	413.297,5	437.749	605.539,5	411.230	0,93	1,00	1,00	0,94	0,96	0,09	0,10
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	58.908	50.955		343.422	128.035	45.593	50.715		307.758	128.035	0,77	1,00		0,90	1,00	0,30	1,60
Pengendalian Keamanan Lingkungan	245.269	362.582,5	437.749	297.781,5	298.340	236.045	362.582,5	437.749	297.781,5	283.195	0,96	1,00	1,00	1,00	0,95	0,05	0,05
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.194.810,8	4.185.791,5	1.486.498,7	1.519.914,5	1.540.102,5	1.128.410,1	3.690.987,2	1.486.107,8	1.476.302	1.509.441	0,94	0,88	1,00	0,97	0,98	0,07	0,08
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP	410.218	627.470	698.279,5	786.154,5	804.276	406.408	618.553,5	698.277,8	766.765	794.727,5	0,99	0,99	1,00	0,98		0,18	0,18
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Siskamswakarsa Daerah	49.699					48.994					0,99						
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	75.656					53.875					0,71						
Pelaksanaan Operasi Yustisi	538.196	707.467	462.850	383.030	341.065	506.757,1	656.520,8	462.850	375.245	337.385	0,94	0,93	1,00	0,98	0,99	-0,11	-0,10

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014	2015	2016	2017	2018	Agr.	Rls.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Umum	50.145	72.847,5	85.485	74.970	88.798	41.815	71.567,5	85.485	71.565	80.801	0,83	0,98	1,00	0,95	0,91	0,15	0,18
Penegakan Peraturan Mengenai Larangan Area Merokok	70.896,8	155.190	98.640	62.092,5	62.092,5	70.561	54.160	98.640	62.092,5	62.092,5	1,00	0,35	1,00	1,00	1,00	-0,03	-0,03
Pengamanan dan Pemeliharaan Kamtramtibmas dari Kegiatan Masyarakat		77.430	94.740	122.962,5	144.840		75.155	94.365	122.760	143.445		0,97	1,00	1,00	0,99	0,26	0,28
Patroli Gabungan				11.622,5	23.450				11.622,5	23.035				1,00	0,98		
Penyelesaian Pelanggaran Perda			46.504,2	79.082,5	75.581			46.490	66.252	67.955			1,00	0,84	0,90	0,70	0,43
Pengadaan Sarana dan Prasarana Satpol PP		2.042.887					1.734.430,4					0,85					
Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasioanl untuk Satpol PP		502.500					480.600					0,96					
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	930.471				463.770	858.200				453.201,3	0,92				0,98	-0,50	-0,47
Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Pemilu	930.471				463.770	858.200				453.201,3	0,92				0,98	-0,50	-0,47
Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai (DBHCHT)	250.000	250.000	250.000	250.000		222.703,5	236.380	248.549	249.927,5		0,89	0,95	0,99	1,00		-1,00	-1,00
Pemberantasan Barang Kena Cukai	250.000	250.000	250.000	250.000		222.703,5	236.380	248.549	249.927,5		0,89	0,95	0,99	1,00		-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014	2015	2016	2017	2018	Agr.	Ris.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ilegal																	

sumber : data laporan keuangan 2014-2018 Dinas

Dari tabel diatas dapat dilihat target dan realisasi anggaran dinas dari tahun 2014 – 2018 terdapat 10 program dan 44 kegiatan, pada umumnya untuk capaian realisasi anggaran hampir 100% dapat terserap. Sumber anggaran pada Dinas terdiri dari DAK, dana DBHCT, dana Pajak Rokok, APBD Provinsi, dan APBD Kota.

Tabel 2.6. B (TC.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019 Rp.	2020 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.167.251.500	3.045.628.210	2.702.213.148	2.617.194.486	0,853	0,859	0,04	0,03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	780.000	1.098.000	780.000	0,998	1,000	0,41	0,41
Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	64.800.000	64.600.000	55.714.230	62.710.945	0,860	0,971	0,00	-0,11
penyediaan jasa peralatan dan pelengkapan kantor	4.500.000		4.455.000		0,990	0,000	0,00	0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.751.515.000	2.680.600.500	2.296.144.193	2.261.686.564	0,835	0,844	0,03	0,02
Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.323.500	40.123.000	15.292.200	37.114.000	0,998	0,925	-0,62	-0,59
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.750.000	2.797.500	3.588.500	2.775.000	0,957	0,992	0,34	0,29
Penyediaan alat tulis kantor	51.213.000	41.861.000	51.163.850	41.856.100	0,999	1,000	0,22	0,22
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.175.000	10.602.300	16.082.900	9.915.000	0,994	0,935	0,53	0,62
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.975.000	2.808.300	3.909.000	2.799.000	0,983	0,997	0,42	0,40
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000	4.324.500	8.500.000	4.105.000	1,000	0,949	0,97	1,07
Penyediaan makanan dan minuman	59.000.000	59.671.610	58.872.214	56.009.300	0,998	0,939	-0,01	0,05

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019 Rp.	2020 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	187.400.000	137.459.500	187.393.061	137.443.577	1,000	1,000	0,36	0,36
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	498.073.000	480.148.500	486.756.735	471.861.393	0,977	0,983	0,04	0,03
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	42.408.000	47.969.000	36.622.610	47.966.595	0,864	1,000	-0,12	-0,24
Pengadaan peralatan gedung kantor	15.000.000	-	14.913.125	-	0,994	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebeleur	9.500.000	-	9.284.000	-	0,977	-	0,00	0,00
Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi	7.000.000	48.451.000	6.968.750	48.451.000	0,996	1,000	-0,86	-0,86
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.040.000	11.416.000	23.004.300	11.315.445	0,998	0,991	1,02	1,03
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	401.125.000	372.312.500	395.963.950	364.128.353	0,987	0,978	0,08	0,09
Peningkatan Disiplin Aparatur	369.725.000	17.500.000	346.585.000	17.152.813	0,937	0,980	20,13	19,21
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	176.975.000	-	160.600.000	-	0,907	-	0,00	0,00
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	192.750.000	17.500.000	185.985.000	17.152.813	0,965	0,980	10,01	9,84
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	32.480.550		30.080.550		0,926	-	0,00	0,00
optimalisasi kemampuan aparatur	32.480.550		30.080.550		0,926	-	0,00	0,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019 Rp.	2020 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.621.000	3.600.000	19.261.000	3.600.000	0,982	1,000	4,45	4,35
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.300.000	3.600.000	12.100.000	3.600.000	0,984	1,000	2,42	2,36
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.478.000		1.351.000		0,914	-	0,00	0,00
Penyusunan laporan prognosis	1.478.000		1.478.000		1,000	-	0,00	0,00
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.478.000		1.478.000		1,000	-	0,00	0,00
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	2.887.000		2.854.000		0,989	-	0,00	0,00
Program Perencanaan dan Penganggaran	4.530.000	10.710.000	4.430.000	10.225.000	0,978	0,955	-0,58	-0,57
Penyusunan rencana kerja SKPD	4.530.000	5.710.000	4.430.000	5.660.000	0,978	0,991	-0,21	-0,22
Penyusunan rencana strategis SKPD	-	5.000.000	-	4.565.000	-	0,913	-1,00	-1,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	390.702.500	520.822.000	389.747.500	520.822.000	0,998	1,000	-0,25	-0,25

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019 Rp.	2020 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	144.182.500	170.200.000	143.227.500	170.200.000	0,993	1,000	-0,15	-0,16
Pengendalian keamanan lingkungan	246.520.000	18.660.000	246.520.000	18.660.000	1,000	1,000	12,21	12,21
Updeting Data Anggota Linmas	-	331.962.000	-	331.962.000	-	1,000	-1,00	-1,00
Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	756.283.500	444.645.000	253.855.200	284.523.000	0,336	0,640	0,70	-0,11
Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	33.437.000	211.600.000	33.437.000	61.600.000	1,000	0,291	-0,84	-0,46
Operasi yustisi	94.960.000	118.300.000	85.034.200	108.178.000	0,895	0,914	0,25	-0,21
Sinergitas penegakan perda dan pemeliharaan kamtramtibmas	68.364.000	820.000	68.314.000	820.000	0,999	1,000	82,37	82,31
Penegakan peraturan mengenai larangan area merokok	462.092.500	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pengamanan dan pemeliharaan kamtramtibmas dari kegiatan masyarakat	30.400.000	27.500.000	30.400.000	27.500.000	1,000	1,000	-0,10	0,11

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019 Rp.	2020 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Patroli Gabungan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	23.620.000	57.050.000	19.620.000	57.050.000	0,831	1,000	-0,59	-0,66
Penyelesaian Pelanggaran Perda	43.410.000	29.375.000	17.050.000	29.375.000	0,393	1,000	0,48	-0,42
Program Dukungan Kelencaran Penyelenggaraan Pemilu	172.160.000	-	171.225.000	-	0,995	-	0,00	0,00
Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Pemilu	60.160.000	-	59.225.000	-	0,984	-	0,00	0,00
perbantuan pengamanan wilayah untuk linmas kab/kota se jawa barat dalam kegiatan pilpres dan pileg tahun 2019	112.000.000	-	112.000.000	-	1,000	-	0,00	0,00

sumber : data laporan keuangan 2019-2020 Satuan

Dari tabel diatas dapat dilihat target dan realisasi anggaran dinas dari tahun 2019 – 2020 terdapat 9 program dan 40 kegiatan, pada umumnya untuk capaian realisasi anggaran hampir 100% dapat terserap.

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan diperlukan adanya pengembangan pelayanan dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban. Adapun secara analisis lingkungan internal, dapat ditentukan faktor kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (di dalam isinya menyebutkan tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum);
2. Pemendagri No 27 Tahun 2010 Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
4. Permendagri No 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Pemendagri No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
6. Permendagri No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Kewenangan melakukan tindakan terhadap aparatur, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda;
11. Dukungan sarana dan prasarana Dinas.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kurangnya SDM Dinas;
2. Kurangnya kualitas personil Dinas dan Linmas;
3. Kurangnya Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi;
4. Sistem informasi yang belum berjalan dengan optimal;
5. Kurangnya dukungan dana.

Selain analisis lingkungan internal, tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

A. Peluang (*Opportunities*) :

1. wilayah kerja yang cukup terjangkau;
2. komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk memperbaiki kinerja Dinas;
3. adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komponen masyarakat;

4. terjalannya ...

4. terjalinnya kerjasama yang sinergi untuk mewujudkan Daerah yang aman, tenteram dan tertib;
5. meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat.

B. Tantangan (*Threats*) :

1. kurangnya pemahaman masyarakat, aparat, dan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan;
2. kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum dan keterbatasan sarana pendukungnya;
3. kurangnya pemahaman budaya Ketentraman, Kebersihan, dan Keindahan;
4. masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas tak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Wali Kota dalam menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta berperan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi.

Dinas dalam memberikan pelayanan belum dapat memenuhi tuntutan masyarakat, walaupun upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sudah dilakukan, namun peningkatan pelayanan sebagaimana diharapkan masyarakat belum dapat diwujudkan secara optimal dan disesuaikan dengan kemampuan jajaran satuan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Peningkatan Pelayanan Sat. Pol. PP, dan Damkar;
2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
3. Anggaran yang terbatas dalam menunjang kegiatan;
4. Jumlah anggota Sat. Pol. PP dan Damkar yang belum sesuai;
5. Potensi gangguan trantibum masyarakat pelanggaran Perda;
6. Peran Masyarakat dan Linmas belum Optimal;
7. Belum optimalnya dalam pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran.

Permasalahan tersebut yang dapat diidentifikasi terkait dengan kinerja pelayanan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi suatu keharusan karena akan mendorong terciptanya hubungan sosial yang adil yang memungkinkan keterlibatan banyak pihak secara sinergis dalam mengembangkan jati dirinya secara profesional. Dinas saat ini disamping sebagai pengaman dan pelaksana berbagai kebijakan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya, berupaya untuk menjaga terpeliharanya suasana dalam keadaan tenteram dan tertib, juga mengembalikan citra sampai kepercayaan masyarakat khususnya dalam upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sempat terpuruk sebagai dampak dari multi krisis yang berkepanjangan. Dalam penjabarannya secara teknis tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah mengawal dan menyukseskan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh jajaran anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2013 – 2018

Visi Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih Kota Sukabumi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai atau *desired future* dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Pembangunan Kota Sukabumi untuk periode 2018 – 2023 adalah :

**“ Terwujudnya Kota Sukabumi
yang Religius, Nyaman dan Sejahtera ”**

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perwujudan Visi RPJMD

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius Nyaman dan Sejahtera	Religius	Pembangunan ditunjukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain
	Nyaman	Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Daerah pun menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas
	Sejahtera	Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara adil. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi

Sumber : RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskanlah misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Pemerintah Daerah, adalah :

1. mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. mewujudkan tataruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;

3. Mewujudkan ...

3. Mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau (*good governance*).

Dalam pelaksanaannya, peran Dinas secara khusus berfungsi dalam menjalankan misi ke-1 yakni **Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga** dan misi ke-2 yakni **mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**, di samping mendukung dalam pelaksanaan kedua misi lainnya.

Secara terperinci, Dinas menjalankan misi tersebut, dengan mengacu pada tujuan mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia dan Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan, serta pada sasaran Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana. Oleh karena itu, sesuai RPJMD, maka Dinas menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan target pencapaian misi ke-1 dan misi ke-2. Program prioritas yang dijalankan tersebut, diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan ditemukan beberapa faktor yang dapat memengaruhi sehingga akan menjadi penghambat dalam pencapaian visi dan misi Wali kota, diantaranya sebagai berikut :

1. kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya Dinas;
2. kurangnya kualitas sumber daya aparatur perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi;

Adapun faktor yang menjadi pendorong dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Sukabumi 2018-2023, diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
4. Peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Provinsi Jawa Barat

Sat. Pol. PP dan Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban dituntut untuk memiliki visi, misi dan strategi dan program kerja yang jelas, terarah dan dapat memenuhi keinginan masyarakat dan seluruh *stakeholders* yang berkepentingan.

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024 terdapat sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat yg ada menetapkan sasaran strategis jangka menengah yaitu Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial. Berdasarkan Renstra kementerian dan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang ada, dapat ditemukan adanya keterkaitan yang konsisten dan saling mendukung pada pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Masing-masing tingkatan telah menetapkan Renstra sesuai kewenangan yang dimilikinya meskipun dengan obyek tugas yang sama.

Memperhatikan keterkaitan antara Renstra Kementerian dengan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang ada terdapat beberapa hal yang ditemukan sebagai faktor pendorong dan penghambat bagi penyelenggaraan tugas. Faktor pendorong terhadap pelayanan Sat. Pol. PP dan Damkar Kota Sukabumi yaitu mengenai penegasan terhadap urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Selanjutnya faktor penghambat lebih kepada upaya pencapaian target masing-masing indikator renstra.

Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra Provinsi dalam hal ini adalah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan pemadam kebakaran yang akan di tangani pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan. Adapun keterkaitan Renstra ini terdapat pada peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran baik sebelum dan sesudah kejadian kebakaran.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Luas wilayah Daerah sekitar 4.800,231 Ha, dengan 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan di dalamnya. Dengan ditetapkannya Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Sukabumi, maka di dalamnya telah jelas mengenai rencana struktur ruang, pengaturan dan penggunaan lahan sekaligus bentuk pengendalian, evaluasi serta bentuk sanksi terhadap RTRW Kota Sukabumi.

Pada Pasal 1 Ketentuan Umum ayat 47 Perda Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Selanjutnya ...

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 95 bahwa penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan analisis antara permasalahan dalam pelayanan Dinas terhadap RTRW Kota Sukabumi ditemukan bahwa salah satunya adalah masih ada opini masyarakat yang negatif terhadap kinerja anggota Dinas dan Linmas sehingga untuk menegakkan daerah tentang RTRW, Satuan Polisi Pamong Praja masih kesulitan sehingga penegakan daerah tentang RTRW belum optimal dilaksanakan. Selain itu, faktor penghambat dalam hal ini adalah jumlah PPNS di Dinas berjumlah 2 (dua) orang, sehingga untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota belum cukup optimal. Adapun faktor pendukungnya adalah adanya sinergitas antara Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan PPNS di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sudah terjalin dengan baik.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan pembahasan telaahan pada subbab sebelumnya maka dapat dirumuskan faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, sehingga dapat diambil beberapa isu-isu strategis diantaranya :

1. Peningkatan Pelayanan Satpol PP, Linmas dan Damkar;
2. Jumlah anggota Satpol pp dan Damkar yang belum sesuai;
3. Potensi gangguan trantibum masyarakat melanggar Perda;
4. Peran Masysarakat dan Linmas belum Optimal;
5. Belum optimalnya dalam pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran.

Untuk memetakan permasalahan serta menentukan solusi dan faktor pendukung maka dibuat matrik berupa analisis SWOT yang mana dijabarkan faktor-faktor dari pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

A. Kekuatan Internal (S)

1. Dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas;
2. Komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas
3. melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap pelanggar perda
4. peraturan-peraturan lainnya terkait penegakan perda

B. Kelemahan Internal (W)

1. kurangnya kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
2. petunjuk teknis dalam penegakan perda belum dipahami;
3. anggaran terbatas; dan
4. sistem informasi dinas belum optimal.

C. Peluang Eksternal (O)

1. Dinamika Perkembangan Hukum Daerah;
2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan trantibumas;
3. Partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketertarikan ketertiban umum dan penegakan perda;
4. kemitraan antara Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat;

D. Tantangan ...

D. Tantangan Eksternal (T)

- 1 kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2 masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya;
- 3 Adanya Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Sat. Pol. PP dan Damkar.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana terurai di atas dapat diringkas dan sipetakan pada tabel analisis SWOT untuk ditemukan berbagai strategi untuk dijadikan dasar alternatif kebijakan sebagai berikut :

**TABEL 3.3.
ANALISIS SWOT**

Analisis Intern Faktor	Kekuatan Internal (S)	Kelemahan Internal (W)
Analisis Faktor Ekstern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Sarana dan Prasarana 3. melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap pelanggaran perda 4. peraturan-peraturan lainnya terkait penegakan perda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas; 2. petunjuk teknis dalam penegakan perda belum dipahami; 3. Anggaran terbatas 4. Sistem informasi dinas belum optimal
Peluang Eksternal (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah kerja yang cukup terjangkau; 2. Letak geografis yang strategis; 3. Kemitraan Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat 4. Tersedianya anggota Linmas yang tersebar di 33 kelurahan dan 7 kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Profesionalisme pegawai 2. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada 3. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dan TNI-POLRI 4. Melakukan optimalisasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota Linmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas pegawai 2. Menyusun Juknis dan Mensosialisasikan secara transparan 3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Pelanggar Perda yang dikoordinasikan tokoh agama dan Tokoh Masyarakat 4. Meningkatkan kualitas anggota Linmas dalam penanganan bencana dan trantibum
Tantangan Eksternal (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Trantibumlinmas; 2 Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan lainnya; 3 Kurang akuratnya data dan informasi trantibum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat tentang Trantibumlinmas 2. Melaksanakan sosialisasi kerjasama untuk mencapai tujuan harus ada dukungan dan peran serta dari tokoh agama dan tokoh masyarakat 3. Meningkatkan kerjasama dalam informasi trantibum dengan instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan tokoh agama/tokoh masyarakat, dan TNI-POLRI untuk Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang Trantibumlinmas dan gakda 2. Memperbanyak kader trantibumlinmas gakda dari tokoh agama/masyarakat 3. Kerjasama dengan TNI-POLRI serta dinas terkait terkait informasi trantibum

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran yang menjelaskan misi, ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan peranan Dinas, semua program dan kegiatan yang dicanangkan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kamtramtibmas;
2. Meningkatkan Pengendalian dan Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran.

1.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yakni sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang memfokuskan pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kamtramtibmas;
2. Meningkatnya pengendalian bahaya kebakaran;
3. Meningkatnya pengurangan resiko bahaya kebakaran.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerja Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 ...

**Tabel 4.1.A (TC.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja (2019-2020)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-	
				2017	2018	2019	2020
Meningkatkan Perlindungan Masyarakat		Terwujudnya Perlindungan Masyarakat	%	-	-	97,25	98
	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran	%	-	-	94,5	96
	Meningkatnya Pengendalian Keamanan Lingkungan	Cakupan Pengendalian Keamanan Lingkungan	%	-	-	100	100

Sumber Data : Analisa Dinas

Pada tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas periode 2019-2020 memunculkan target kinerja tahunan.

Tabel ...

**Tabel 4.1.B (TC.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (2021-2023)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatkan Kamtrantibmas		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	70%	75%	80%
		Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)	Persentase Pelayanan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Pengendalian dan Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran		1. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korbak Kebakaran 2. Persentase Pengurangan Risiko Bahaya Kebakaran	90%	90%	90%
		Meningkatnya pengendalian bahaya kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	90%	90%	90%
		Meningkatnya pengurangan resiko bahaya kebakaran	1. Persentase Penyelamatan Korban Bencana Kebakran 2. Persentase Penyelamatan Aset Bencana Kebakaran	90%	90%	90%

Sumber Data : Analisa Dinas

Pada tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas periode 2021-2023 memunculkan target kinerja tahunan. Dimana pada tabel 4.3 merupakan indikator baru pada Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Wujud nyata strategi adalah berupa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam proses organisasi. Dalam penetapan kebijakan ini, pimpinan atau *top leader* harus mampu memformulasikan kebijakan yang menjadi pedoman, suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga setiap pejabat dan pelaksana dalam organisasi mengetahui adanya dukungan dalam pelaksanaan tugas dan implementasi keputusan.

Pemilihan kebijakan harus selektif sehingga dapat mempertajam arti strategi sebagai pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan tidak hanya teori.

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran maka diperlukan strategi dan kebijakan untuk memformulasikan visi dan misi agar dapat dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1.A Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi

VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA			
MISI I : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Meningkatkan Disiplin Masyarakat dan Pengendalian terhadap Kamtramtibmas	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	Meningkatkan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi kegiatan polisi pamong praja
			2. Melaksanakan Operasi Yustisi
			3. Melaksanakan Sinergitas Penegakan Perda dan Pemeliharaan Kamtramtibmas
			4. Melaksanakan Penegakan Peraturan Mengenai Larangan Area Merokok
			5. Melaksanakan Pengamanan dan Pemeliharaan Kamtramtibmas dari Kegiatan Masyarakat
			6. Patroli Gabungan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban
			7. Penyelesaian Pelanggaran Perda
			8. Pendidikan dan Pelatihan Sat.Pol. PP
			9. Fasilitasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya Pengendalian Keamanan Lingkungan
			2. Melaksanakan Pengendalian Keamanan Lingkungan
			3. Melaksanakan Updating Anggota Linmas
			4. Melaksanakan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Pemilu

Sumber : Analisa Dinas

Pada tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas menetapkan 3 strategi dan 10 kebijakan pada periode 2018-2023

Tabel 5.1.B (T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi

VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA			
MISI I : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Meningkatkan Kamtramtibmas	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Melaksanakan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			2. Melaksanakan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan
			3. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tk. Kab/Kota
			4. Melaksanakan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
			5. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
			6. Melaksanakan Penegakan Perda Kabupaten/Kkota dan Peraturan Bupati/Walikota
			7. Melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			8. Melaksanakan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			9. Melaksanakan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
MISI II : Mewujudkan Tata Ruang Dan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan			
Meningkatkan Pengendalian dan Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Melaksanakan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2. Melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah kab/kota

VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA		
		3. Melaksanakan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota
		4. Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri
		5. Melaksanakan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya pengurangan resiko bahaya kebakaran	1. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		2. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		3. Melaksanakan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		4. Melaksanakan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
		5. Melaksanakan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
6. Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi		

Sumber : Analisa Dinas

Pada tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas menetapkan 2 strategi dan 5 kebijakan pada periode 2021-2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas merupakan hal pendukung untuk mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Daerah berfungsi sebagai Perangkat Daerah teknis dalam bidang keamanan dan ketertiban di Daerah.

Penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang akan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan target berdasar kepada perhitungan indikator kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pendanaan indikatif yang ditetapkan merupakan proyeksi kebutuhan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 6.1.A (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi Tahun 2019-2020**

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		1	URUSAN WAJIB							
		1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
		1:01:05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
		1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5.538.827,5		7.232.656,15	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pol PP				Nilai SAKIP Pol PP		0,1%		0,1%		
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas			Persentase Sarana dan Prasarana Pol PP yang berkualitas dan Layak Fungsi						
		1.01.1.0 1.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.123.613,5	100%	3.396.568,5	
		1.01.1.0 1.05.01. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	280 Lbr	280 Lbr	1.200	280 Lbr	1.200	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	Tahun 2019		Tahun 2020		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		1.01.1.0 1.05.01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	12 Bulan	12 Bulan	55.200	12 Bulan	57.600	
		1.01.1.0 1.05.01. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah belanja Jasa Iklan/advetoria	-	15 Buah	6.213,5	-	-	
		1.01.1.0 1.05.01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah TKK dan THL	107 Orang	107 Orang	2.500.000	107 Orang	2.679.900,5	
		1.01.1.0 1.05.01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat-alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor	14 Item dan 12 Bulan	20 Item dan 12 Bulan	14.500	24 Item dan 12 Bulan	38.723	
		1.01.1.0 1.05.01. 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	16 Unit	12 Unit	10.000	22 Unit	6.000	
		1.01.1.0 1.05.01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	37 Item	41 Item	85.000	42 Item	65.000	
		1.01.1.0 1.05.01. 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 Rim dan 10 Dus	15 Rim dan 10 Dus	16.500	15 Rim dan 8 Dus	16.195	
		1.01.1.0 1.05.01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen untuk penerangan kantor	12 Item	12 Item	10.000	16 Item	4.000	
		1.01.1.0 1.05.01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	8 Koran	8 Koran dan 20 Buku	15.000	8 Koran dan 10 Buku	8.500	

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	Tahun 2019		Tahun 2020		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		1.01.1.0 1.05.01. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman jamuan rapat kantor dan jamuan tamu	1100 Dus	1400 Dus	60.000	3.020 Dus	90.100	
		1.01.1.0 1.05.01. 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Pendaan untuk perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	350.000	12 Bulan	429.350	
	tingkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Kompetensi SDM dalam mendukung Pencapai-an Kinerja			Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Kompetensi SDM dalam mendukung Pencapai-an Kinerja						
		1.01.1.0 1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pesentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	454.165	100%	606.630	
		1.01.1.0 1.05.02. 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kebutuhan kantor	15 Unit	22 Unit	33.500	13 Unit		
		1.01.1.0 1.05.02. 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kebutuhan kantor	1 Unit	2 Unit	15.000	-	-	
		1.01.1.0 1.05.02. 10	Pengadaan Meublair	Jumlah Meublair kebutuhan kantor	-	10 Buah	9.500	15 Buah	3.000	
		1.01.1.0 1.05.02. 18	Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat-alat Studio dan komunikasi kebutuhan kantor	1 Unit	2 Unit	7.000	52 Unit	67.000	
		1.01.1.0 1.05.02. 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah sarana yang diperbaiki	1 Paket	1 Paket	23.040	1 Paket	25.000	
		1.01.1.0 1.05.02. 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	17 Unit	20 Unit	366.125	22 Unit	437.980	

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	Tahun 2019		Tahun 2020		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		1.01.1.0 1.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kerja Pegawai untuk Peningkatan Disiplin Manajemen	100%	100%	219.910	100%	255.630	
		1.01.1.0 1.05.03. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian seragam Polisi Pamong Praja beserta perlengkapannya	145 Stel dan 145 Psg	155 Stel dan 155 Psg	144.910	160 Stel dan Psg	198.950	
		1.01.1.0 1.05.03. 05	Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	-	150 Stel	75.000	210 Buah	56.680	
		1.01.1.0 1.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan Pemahaman Sumber daya Terhadap Perda/Perwal Aparatur	100%	50%	55.000	60%	55.000	
		1.01.1.0 1.05.05. 10	Optimalisasi Kemampuan Aparatur	Jumlah anggota Sat.Pol.PP yang terampil	-	50 Orang	55.000	50 Orang	65.000	
		1.01.1.0 1.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Ketersediaan Dokumen Pencapaian Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	18.526,5	100%	15.600	

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	Tahun 2019		Tahun 2020		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		1.01.1.0 1.05.06. 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku LAKIP,LPPD dan LKPJ	3 Buku	3 Buku	9.776,5	5 Buku	3.600	
		1.01.1.0 1.05.06. 02	Penyusun Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah buku laporan semesteran	1 Buku	1 Buku	1.750	1 Buku	2.100	
		1.01.1.0 1.05.06. 03	Penyusun Laporan Keuangan Prognosis	Jumlah buku laporan prognosis anggaran	1 Buku	1 Buku	1.750	1 Buku	2.100	
		1.01.1.0 1.05.06. 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah buku laporan akhir tahun	1 Buku	1 Buku	1.750	1 Buku	2.100	
		1.01.1.0 1.05.06. 05	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	Jumlah buku laporan SPIP	1 Buku	1 Buku	3.500	1 Buku	5.700	
		1.01.1.0 1.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase Keteresuaian Perencanaan Anggaran oleh Perangkat Daerah dengan Dokumen RTRW, RPJMD dan RKPD	100%	100%	5.000	100%	8.950	
		1.01.1.0 1.05.08. 01	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja	1 Buku dan 1 Keg.	1 Buku dan 1 Keg.	5.000	1 Buku dan 1 Keg.	8.950	
		1.01.1.0 1.05.08. 02	Penyusunan Resntra SKPD	Jumlah dokumen Resntra	1 Buku dan 1 Keg.	-	-	-	-	

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	Tahun 2019		Tahun 2020		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Disiplin Masyarakat dan Pengendalian terhadap Kamtramtibmas				Tingkat Pengendalian Kamtramtibmas		94,5	1.111.532			
				Tingkat Pengendalian Keamanan Lingkungan						
			1.01.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Pengamanan pada Hari-Hari Besar	100%	100%	355.702,5	100%	1.144.226,75
			1.01.05.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Anggota Linmas yang terlatih	2075 Orang	420 Orang	115.702,5	450 Orang	332.051,75
			1.01.05.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Banyaknya Kegiatan Pengamanan di Hari Besar-Besar	14 Keg.	14 Keg.	240.000	6 Keg.	462.800
			1.01.05.15.08	Updating Anggota Linmas	tersedianya data base anggota linmas	1 Buku			1 Buku	349.375
			1.01.05.15.xx	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Pemilu	Jumlah pengamanan dan penertiban Tahapan kegiatan Pemilu	20 Kegiatan				

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	Tahun 2019		Tahun 2020		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran						
		1.01.05.1.01.05.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang tertangani	100%	94.5%	755.829,5	96%	1.739.959,9	
		1.01.05.1.01.05.16.01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol.PP/	Penataan dan Penertiban terhadap pelanggaran Perda	365 Hari	365 Hari	120.829,5	365 Hari	344.900	
		1.01.05.1.01.05.16.06	Operasi Yustisi	Banyaknya Kegiatan Operasi Yustisi	50 Keg.	55 Keg.	275.000	20 Keg.	227.207,4	
		1.01.05.1.01.05.16.08	Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan	Jumlah Penyelenggaraan gelar Pasukan Tk. Kota, Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	3 Keg.	3 Keg.	120.000	5 Keg.	314.200	
		1.01.05.1.01.05.16.11	Penegakan Peraturan Mengenai Larangan Area Merokok	Jumlah Penertiban Kawasan Tanpa Rokok	10 Keg.	30 Keg.	65.000	23 Keg.	462.092,5	
		1.01.05.1.01.05.16.12	Pengamanan dan Pemeliharaan Kamtramtibmas dari Kegiatan Masyarakat	Jumlah Penanganan dan Pengamanan Unjuk Rasa di Kota Sukabumi	47 Keg.	20 Keg.	45.000	16 Keg.	410.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		1.01.05.1.01.05.16.13	Patroli Wilayah Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Patroli Gabungan dan Patroli Siaga	2 Keg.	4 Keg.	70.000	6 Keg.	100.460	
		1.01.05.1.01.05.16.16	Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Kegiatan Tipiring yang dilaksanakan	5 Keg.	12 Keg.	60.000	32 Keg.	250.000	
		2:00	URUSAN PILIHAN							
		2:00:06	PERDAGANGAN							
		1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
		2.00.06.1.01.05.20.	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT)	Cakupan Penurunan Penggunaan Barang Kena Cukai Ilegal	100%	100%				
		2.00.06.1.01.05.20.03	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran		33 Keg.	33 Keg.	250.000			
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
		1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		5.00.01.1.01.05.01.18	*PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Persentase Keamanan Pemilu	100%	100%	183.160			
		5.00.01.1.01.05.01.18.03	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Pemilu	Banyaknya Pengamanan Tahapan Pemilu	20 Keg.	40 Keg.	183.160			
			Total				5.538.827,05		7.232.656,15	

Sumber : Analisa Dinas

Tujuan

Tabel

**Tabel 6.1.B. (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi Tahun 2021-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar	Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel			Nilai SAKIP Pol PP dan Damkar	BB		BB		BB		BB			
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yg Efektif dan Efisien	90%		95%		95%		95%			
		01.5.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	11.205.069	100%	11.485.195	100%	11.583.968	100%	34.278.532		
		01.5.01.2:01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu dan berkualitas	100%	27.680	100%	34.000	100%	34.000	100%	95.680	Sekretariat	
		01.5.01.2:01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	3 Buku	14.050	3 Buku	16.500	6 Buku	16.500	12 Buku	47.050		Satpol PP dan Damkar
01.5.01.2:01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah buku LAKIP, LPPD, LKPJ dan SPM	4 Buku	7.880	4 Buku	10.000	4 Buku	10.000	12 Buku	27.880		Satpol PP dan Damkar		

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Realisasi Kinerja SKPD											
		01.5.0 1.2:01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan SPIP	1 Buku	5.750	1 Buku	7.500	1 Buku	7.500	3 Buku	20.750		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:02	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.650.928	100%	6.707.000	100%	6.805.773	100%	19.168.001	Sekretariat	
		01.5.0 1.2:02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	43 Orang/B ulan	5.644.478	50 Orang/B ulan	6.700.000	55 Orang/B ulan	6.798.773	55 Orang/Bul an	19.149.701		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah buku laporan akhir tahun	1 Buku	2.150	1 Buku	3.500	1 Buku	3.500	3 Buku	9.150		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah buku laporan semesteran	1 Buku	2.150	1 Buku	3.500	1 Buku	3.500	3 Buku	9.150		Satpol PP dan Damkar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD											
		01.5.0 1.2:02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku laporan prognosis anggaran	1 Buku	2.150	1 Buku	3.500	1 Buku	3.500	3 Buku	9.150		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	305.980,5	100%	310.000	100%	310.000	100%	930.280	Sekretariat	
		01.5.0 1.2:05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian seragam Polisi Pamong Praja beserta perlengkapannya dan Pakaian Kerja Lapangan	140 Stel	184.425	175 Stel	160.000	175 Stel	160.000	390 Stel	508.725		Satpol PP dan Damkar
				Jumlah pakaian hari-hari tertentu	140 Stel		175 Stel		175 Stel		390 Stel			
		01.5.0 1.2:05. 09	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelatihan dan Pendidikan	-	-	2 Kegiatan	50.000	2 Kegiatan	50.000	4 Kegiatan	100.000		
		01.5.0 1.2:05. 11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah anggota Sat.Pol.PP yang terampil	50 Orang	121.555,5	165 Orang	100.000	165 Orang	100.000	280 Orang	321.555		Satpol PP dan Damkar

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.5.0 1.2:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	425.783	100%	398.500	100%	398.500	100%	1.222.783	Sekretariat	
		01.5.0 1.2:06. 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor	Jumlah komponen untuk penerangan kantor	16 Item	4.000	20 Item	4.000	20 Item	4.000	56 Item	12.000		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat-alat kebersihan	20 Item	81.973	20 Item	85.000	20 Item	85.000	60 Item	251.973		Satpol PP dan Damkar
				Jumlah Alat Tulis Kantor	43 Item		43 Item		43 Item		129 Item			
		01.5.0 1.2:06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	-	24 Buah	10.000	24 Buah	10.000	48 Buah	20.000		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	8.405	12 Bulan	6.000	12 Bulan	6.000	36 Bulan	20.405		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:06. 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang- undangan	8 Koran	8.500	8 Koran	8.500	8 Koran	8.500	24 Koran	25.500		Satpol PP dan Damkar

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.5.0 1.2:06. 08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah makanan dan minuman jamuan rapat kantor dan jamuan tamu	3900 Dus	86.775	4100 Dus	85.000	4100 Dus	85.000	12.100 Dus	256.775		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:06. 09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pendaan untuk perjalanan dinas	643 HOK	236.130	1000 HOK	200.000	1000 HOK	200.000	2.643 Hok	636.130		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	1.666.032	100%	285.195	100%	285.195	100%	2.236.422	Sekretariat	
		01.5.0 1.2:07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Motor Dinas/Operasion al	3 Unit	1.471.000	4 Unit	120.195	4 Unit	120.195	11 Unit	1.711.390		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meublair kebutuhan kantor	9 Buah	7.500	15 Buah	15.000	15 Buah	15.000	39 Buah	37.500		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan, Perlengkapan dan Alat Studio Komunikasi	35 Unit	187.532	50 Unit	150.000	50 Unit	150.000	135 Unit	487.532		Satpol PP dan Damkar

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.5.0 1.2:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.652.805	100%	3.056.250	100%	3.056.250	100%	8.765.305	Sekretariat	
		01.5.0 1.2:08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	240 Lembar	1.080	125 Lembar	1.250	125 Lembar	1.250	590 Lembar	3.580		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	12 Bulan	66.600	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	36 Bulan	206.600		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa iklan	12 Bulan	84.600	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	36 Bulan	254.600		Satpol PP dan Damkar
				Jumlah jasa kebersihan kantor	5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang			
		01.5.0 1.2:08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKK dan THL	93 Orang	2.500.525	100 Orang	2.900.000	100 Orang	2.900.000	293 Orang	8.300.525		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	471.560,5	100%	694.250	100%	694.250	100%	1.860.061	Sekretariat	

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.5.0 1.2:09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	34 Unit	439.410,5	34 Unit	650.000	34 Unit	650.000	102 Unit	1.739.411		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	30 Unit	8.350	35 Unit	9.250	35 Unit	9.250	100 Unit	26.850		Satpol PP dan Damkar
		01.5.0 1.2:09. 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana yang diperbaiki	1 Gedung	23.800	2 Gedung	35.000	2 Gedung	35.000	2 Gedung	93.800		Satpol PP dan Damkar
Meningkatkan Kamtibmas				Indeks Keamanan dan Ketertiban	75%		80%		85%		85%			
	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)			Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	100%		100%		100%		100%			

Tujuan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	1.5.02	PENINGKAT AN KETENTERA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	100%	1.019.232	100%	1.044.712	100%	1.053.697	100%	3.117.642		
		1.5.02 .2:01	Penanganan Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Keamanan Lingkungan	100%	463.975	100%	650.000	100%	658.985	100%	1.772.960		
		1.5.02. 2:01.0 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Penataan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran	1 Tahun	42.945	1 Tahun	100.000	1 Tahun	100.000	1 Tahun	242.945	Kasi Dal.Ops	Kota Sukabumi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.5.02. 2:01.0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan dan Pengamanan Unjuk Rasa di Kota Sukabumi	11 Keg.	20.350	40 Keg.	50.000	40 Keg.	58.985	91 Keg	129.335	Kasi Trantib	Kota Sukabumi
		1.5.02. 2:01.0 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang terlatih		224.000	810 Orang	300.000	820 Orang	300.000	1630 Orang	824.000	Kasi Linmas	Kota Sukabumi
				Jumlah kegiatan pengamanan di hari besar keagamaan	14 Kegiatan		14 Kegiatan		14 Kegiatan		42 Keg.			
				Tersedianya buku data base anggota linmas	1 Buku		1 Buku		1 Buku		3 Buku			
				Pam Tahapan Pilpres, Pileg, Pilgub dan Pilwalkot					21 Keg.		21 Keg.			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.5.02. 2:01.0 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Penyelenggaraan gelar Pasukan Tk. Kota, Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	3 Keg.	176.680	5 Keg.	250.000	5 Keg.	300.000	13 Keg	576.680	Kasi SDA	Kota Sukabumi
		1.5.02 .2:02	Penegakan Perda Kabupaten/ Kkota dan Peraturan Bupati/Walik ota	Cakupan Perda dan Perkada yang ditegakan	90%	555.257	90%	394.712	95%	394.712	95%	1.344.682		
		1.5.02. 2:02.0 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walik ota	Junlah Kegiatan Sosialisasi	1 Keg.	45.280	3 Keg.	139.712	3 Keg	139.712	7 Keg.	324.704	Kasi Binwasluh	Kota Sukabumi
		1.5.02. 2:02.0 2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan	Jumlah Penertiban Kawasan Tanpa Rokok	30 Keg.	462.092	-	-	-	-	30 Keg.	462.092,5	Kasi Gakda	Kota Sukabumi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			peraturan bupati/walikota											
		1.5.02.2:02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi yustisi dan Kegiatan Tipiring yang dilaksanakan	12 Keg.	47.885	25 Keg.	255.000	25 Keg.	255.000	62 Keg.	557.885	Kasi Gakda	Kota Sukabumi
Meningkatkan Pengendalian dan Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	90%		90%		90%		90%			
	Meningkatnya pengendalian bahaya kebakaran			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	90%		90%		90%		90%			
		1.5.04	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pengurangan Resiko Bahaya Kebakaran	30%	589.260	60%	603.991	100%	609.185	100%	1.802.436		
				Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran	75%		90%		100%		100%			
		Persentase Penyelamatan Non Kebakaran		60%		80%		100%		100%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1.5.04 .2:01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	90%	425.840	90%	378.991	90%	384.185	90%	1.189.016			
		1.5.04. 2:01.0 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	4 Dok	190.440	4 Dok	153.991	4 Dok	159.185	12 Dok.	503.616	BID. Damkar	Kota Sukabumi	
				Jumlah Hasil Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung	1 Unit		1 Unit		1 Unit		3 Unit				
				Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan	1 Keg.		1 Keg.		1 Keg.		3 Keg.				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- Gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.5.04. 2:01.0 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Pemadam Kebakaran	1 Paket	195.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	3 Paket	395.000		
		1.5.04. 2:01.0 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan			1 Paket	75.000	1 Paket	75.000	2 Paket	150.000		
		1.5.04. 2:01.0 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Sosialisasi	2 Orang	40.400	5 Orang	50.000	5 Orang	50.000	12 Orang	140.400		
	meningkatkan pengurangan resiko bahaya kebakaran			1. Persentase Penyalamatan Korban Bencana Kebakaran 2. Persentase Penyelamatan Aset Bencana Kebakaran	90%		90%		90%		90%			
		1.5.04. 2:04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Relawan Kebakaran di bawah binaan Pemadam Kebakaran	90%	163.420	90%	175.000	90%	175.000	90%	513.420		
		1.5.04. 2:04.0	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peserta Satlaker	100 Orang	163.420	200 Orang	75.000	300 Orang	75.000	600 Orang	313.420		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan	1500 Pelajar/15 Sekolah SD		2000 Pelajar/20 Sekolah SD		2000 Pelajar/25 Sekolah SD		5500 Pelajar/60 Sekolah SD	-		
		1.5.04.2:04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan			1 Kegiatan	50.000	1 Kegiatan	50.000	2 Keg.	1.050.000		
		1.5.04.2:04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat			5 Unit	50.000	5 Unit	50.000	10 Unit	420.000		
		1.5.04.2:05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang layak pakai			90%	50.000	90%	50.000	90%	10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung-Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.5.04. 2:05.0 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayak an Manusia/Pen yelamatan dan Evaluasi	Jumlah Sarana dan Prasarna Pertolongan			1 Paket	50.000	1 Paket	50.000	2 Paket	100.000		
Total						12.813.561		13.133.898		13.246.850		39.194.309		

Sumber : Analisa Dinas

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023, Dinas memiliki peranan yang penting sebagai instansi yang mengendalikan keamanan dan ketertiban Daerah melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran. Selain itu perpanjangan tangan Dinas juga terletak pada peran aktif masyarakat dalam pembentukan anggota Linmas, maka dari itu penjabaran indikator kinerja Dinas mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang terdapat di dalam RPJMD.

Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persen	100	100
2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Orang	420	-
3	Persentase Penegakan Perda	Persen	80	85
4	Cakupan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persen	100	100
5	Persentase Unjuk Rasa Terkendali	Persen	100	100

Sumber : Analisa Dinas

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun			
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	6	7	8	9
1	Persentase Penegakan Perda	Persen	90	95	100	100
2	Cakupan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persen	100	100	100	100
3	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban kebakaran.	Persen	90	90	90	90

Sumber : Analisa Dinas

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan bidang atau urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun. Di susun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang atau urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Daerah. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas ini akan menjadi acuan resmi penilaian Dinas. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas dan RKA Dinas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Sukabumi. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas dan RKA Dinas merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang atau urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan atau target kinerja sasaran Dinas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas yang telah dijabarkan dalam Renja Dinas dan RKA Dinas harus di tingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti atau *Prove* pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas ini.

Sukabumi, 5 Maret 2021
WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI